



GITA SANG SURYA

Madah Persaudaraan Semesta

SUSTAINABLE AGRICULTURE ORGANIC

GO GREEN

PRO PEOPLE

PRO PLANET

GO ORGANIC

PRO PROFIT

GO CLEAN



GAGASAN PATER THOBIAS HARMAN OFM | 11
MENGENAI EKONOMI BERKELANJUTAN



04 | Paus Fransiskus dan Tata Ekonomi Baru

Humanisme Ekologis, Ekonomi, dan Proyek Manusia | 07

JPIC OFM INDONESIA

JPIC-OFM Indonesia atau Franciscans Office for Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum merupakan bagian integral dari pelayanan persaudaraan Fransiskan di Indonesia dalam bidang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dengan mandat Injili dan spiritualitas St. Fransiskus Asisi, JPIC-OFM Indonesia berusaha mengupayakan suatu cara hidup dan karya yang menjawab tantangan zaman, kepedulian dan pembelaan bagi yang miskin dan tertindas.

Kegiatan-kegiatan JPIC-OFM meliputi 6 (enam) bidang yaitu Bidang Advokasi, Bidang Animasi, Bidang Litbang, Bidang Sosial Karitatif (Rumah Singgah St. Antonius Padua), Bidang Ekologi, dan Bidang Ekopastoral yang bekerja di Jakarta dan Flores.

Pada saat ini, JPIC-OFM Indonesia terlibat dalam kegiatan ekopastoral (pengembangan pola pertanian organik) di Flores, Rumah Singgah St. Antonius Padua bagi kaum miskin dan gelandangan di Jakarta, pemberdayaan sosial ekonomi bagi masyarakat korban bencana alam, animasi kaum muda dan kaum religius dalam bidang JPIC, penerbitan majalah Gita Sang Surya (Majalah Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan) dan buku-buku, penyadaran HAM, lingkungan hidup, dan pengolahan sampah di Jakarta, serta seminar dan diskusi bulanan seputar isu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sejak 2007 JPIC-OFM terlibat dalam advokasi untuk masyarakat korban tambang di Nusa Tenggara Timur.

Untuk mewujudkan misi tersebut, JPIC-OFM Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga semisi dalam lingkup Gereja maupun umum (LSM dan lembaga kajian), baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam lingkaran keluarga Fransiskan sendiri, JPIC-OFM Indonesia berafiliasi dengan JPIC-OFM General di Roma dan Franciscans International (NGO keluarga Fransiskan yang bersifat konsultatif di PBB) yang berkantor di New York dan Genewa.

Bantuan dan dukungan bagi kegiatan JPIC-OFM dapat disalurkan ke:

Bank BCA, Nomor Rekening: 6340700510

Atas nama **Ordo Saudara-saudara Dina qq JPIC OFM**



Sekretariat JPIC OFM Indonesia:

Jl. Letjend. Soeprapto No.80 Galur – Tanah Tinggi, Jakarta Pusat 10540

Telp/Faks: (021) 42803546, E-mail: jpicofm_indonesia@yahoo.com.au

Jika sudah menerima Majalah GSS, harap konfirmasi ke 0819-0410-1226

GITA SANG SURYA

Madah Persaudaraan Semesta

Diterbitkan oleh JPIC OFM Provinsi St. Mikael Indonesia dan SKPKC Provinsi Fransiskus Duta Damai Papua sebagai media animasi dan informasi dalam bidang *Justice, Peace, and Integrity of Creation*.

Penanggung Jawab: Ketua Komisi JPIC OFM Indonesia.

Pemimpin Redaksi: Fridus Derong OFM. **Redaktur**

Pelaksana: Yohanes Wahyu Prasetyo OFM. **Redaksi:** Bimo Prakoso OFM, Johnny Dohut OFM, Mikael Gabra Santrio OFM, dan Valens Dulmin. **Bendahara:** Guido Ganggus OFM. **Sirkulasi:** Arief Rahman. **Lay Out:** Luga Bonaventura OFM.

Alamat Redaksi: JPIC OFM Indonesia, Jln. Letjend. Soeprapto, No. 80 Galur, RT.7/RW.4, Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10540. **HP (WA):** 081904101226. **Email:** gss_jpicofm@yahoo.com.

Website:
www.jpicofmindonesia.org.

Redaksi menerima artikel, opini, berita, refleksi, puisi, cerpen, dan karikatur yang membahas tema terkait keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tulisan dapat dikirim melalui email dan akan diolah oleh redaktur tanpa mengabaikan isi sebagaimana dimaksudkan penulis.

DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i>	1
<i>Editorial</i>	2
<i>Antar Kita</i>	3
<i>Gita Utama</i>	4
<i>Gita Utama</i>	7
<i>Sosok</i>	11
<i>ASG</i>	14
<i>Opini</i>	24
<i>Nasional</i>	31
<i>Internasional</i>	33
<i>Inspirasi</i>	35
<i>Inspirasi</i>	39
<i>Resensi</i>	50
<i>Cerpen</i>	54
<i>Cerpen</i>	56
<i>Puisi</i>	58
<i>Karikatur</i>	62
<i>Karikatur</i>	63
<i>Refleksi</i>	64
<i>Wacana Fransiskan</i>	72
<i>Obral Ide</i>	78

RAS, ETNIS, DAN BANGSA SEBAGAI KONTRUKSI SOSIAL: KONTEKS BRITANIA RAYA DAN NKRI

Yulius Fery Kurniawan OFM

(Alumnus Magister Filsafat STF Driyarkara)

PENGANTAR

Isu pokok yang hendak dibahas dalam tulisan ini demikian: ras, etnisitas, dan bangsa sebagai identitas dan ikatan suatu kelompok sebenarnya tidak bersifat primordial tetapi merupakan konstruksi sosial. Tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tiga bagian sesudah pengantar bermaksud menguraikan identitas ras, etnis, dan bangsa sebagai konstruksi sosial. Bagian kelima mencoba memahami ketiga identitas dalam konteks Britania Raya. Bagian akhir berusaha mengaitkan tema ini dalam konteks Indonesia.

RAS SEBAGAI KONTRUKSI SOSIAL

Konsep ras mengandaikan semacam kondisi ideal suatu populasi yang memiliki kesamaan fisik (pigmen kulit, tekstur rambut, dan bentuk wajah) karena tetap dipertahankannya perkawinan sedarah atau internal dalam kelompok tersebut (Pilkington 2015: 68-69). Dalam masyarakat tradisional yang terisolir dan eksklusif tentu saja kondisi demikian masih mungkin dan dianggap lumrah. Mereka tidak pernah memproblematisir kekhasan fisik mereka.

Konseptualisasi atas perbedaan fisik itu baru dimulai sejak abad ke-17 dan menjadi matang sejak abad ke-18 yang kemudian dikenal sebagai perbedaan ras (Pilkington 2015: 70). Kemunculannya bersamaan dengan awal mula Pencerahan yang menawarkan cara berpikir modern bercirikan subyek (barat) dan obyek (masyarakat non-barat), sistematis (realitas dijelaskan dalam kategori-kategori), empiris (bertolak dari pengalaman faktual), dan rasional (setiap konsep diturunkan dari proses penalaran). Melalui cara pikir modern, konsep ras menjadi cara Barat untuk membedakan antara kami "orang Barat" dan mereka "orang Timur".

Dalam kategori rasial, perbedaan fisik dipahami secara esensial, yakni bersifat alamiah sehingga sudah terberi dan tidak bisa diubah (Spencer 2006: 239-240). Namun cara pandang ini dinilai sudah tidak memadai berdasarkan dua hal berikut (Pilkington 2015: 69). *Pertama*, pengkategorian ras yang mengandaikan adanya populasi dalam kondisi terisolir satu sama lain sudah tidak ditemukan sejak abad ke-16. Dengan demikian, tidak dapat ditunjukkan dengan jelas

adanya populasi dengan satu jenis ras sementara pada kenyataannya perkawinan lintas populasi justru menunjukkan peningkatan.

Kedua, konsep ras yang memfokuskan perhatiannya pada perbedaan yang tampak (fenotipe) sudah ditunjukkan kekeliruannya sejak penemuan variasi genetik oleh Mendel. Skema klasifikasi ras dipandang tidak memadai lagi di hadapan fakta, sekitar 85% variasi genetik terjadi di dalam populasi. Tidak ada gen yang secara langsung menentukan seseorang termasuk dalam ras kaukasoid, mongoloid, dsb sehingga klasifikasi ras tidak memiliki dasar alamiah (biologis). Dengan ini dapat ditunjukkan amat mustahil untuk menyusun klasifikasi tunggal tentang populasi manusia.

Andrew Pilkington (2015: 69-70) menyebutkan dua paradoks yang dapat ditarik dari dua kritik di atas. *Di satu pihak* perkembangan saintifik dengan jelas menunjukkan tidak ada ras sebagai kenyataan alamiah dan *di lain pihak*, adanya praktek klasifikasi manusia berdasarkan kategori rasial memiliki akibat nyata. Konsep ras yang pada mulanya sekedar cara untuk membedakan populasi

tertentu menjadi rasialisme, yakni suatu tindakan dan cara untuk menundukkan orang lain berdasarkan perbedaan rasial. Lama-kelamaan konsep ras tidak hanya didasarkan pada perbedaan fisik tetapi juga dalam hal kemampuan intelektual dan pencapaian kultural suatu populasi. Klasifikasi rasial juga dijadikan pembenaran memasukkan penduduk suatu wilayah koloni ke dalam ras inferior.

Pengkategorian ras inferior juga didasarkan atas analogi antara perbedaan seksual dan ras, sebagaimana dikatakan oleh Stephen (Pilkington 2015: 70): *Perempuan dan bangsa-bangsa yang lebih rendah secara bawaan bersifat impulsif, lebih suka meniru daripada bersikap apa adanya (orisinil) dan tidak mampu berpikir abstrak seperti para pria kulit putih ... singkatnya, ras-ras yang lebih rendah merepresentasikan tipe perempuan dari spesies manusia dan perempuan-perempuan dari ras yang lebih rendah.*

Ras inferior yang dinilai dalam kategori feminin dikagumi karena eksotik secara seksual, pasif, tidak berambisi dan karenanya menarik untuk didominasi. Kolonialisme di Asia, Afrika, dan Karibia sebenarnya merupakan bentuk kelihatan dari kombinasi antara ketertarikan seksual dan rasa jijik pada ras inferior; seperti rasa cinta yang posesif (Spencer 2006:

105-106). Dalam rasisme selalu termuat tendensi dikriminatif terhadap gender.

Pengkategorian rasial, dengan demikian, memiliki dua dampak terjauh sebagai berikut: *Pertama*, kaum imperialis Barat berkulit putih yang mengklasifikasikan dirinya ke dalam ras unggul merasa "terpanggil" untuk menjadikan ras-ras lain menjadi lebih beradab. Ras kulit berwarna perlu dipimpin, dididik, dan disadarkan merupakan salah satu gagasan penting dalam humanisme Barat, yang berjalan bersamaan dengan imperialisme (Hardiman 2012: 34-40). *Kedua*, klasifikasi ras diterapkan untuk melegitimasi perbudakan abad ke-20 terhadap negara koloni dan orang-orang Afrika berkulit hitam, bahkan mencapai kekejamannya yang paling pekat pada abad ke-20, yakni tragedi *Holocaust*; pembunuhan bangsa Yahudi oleh rezim Nazi.

Praktek rasialisme oleh Barat sesungguhnya menunjukkan kontradiksi dalam konsep humanisme universal ala Barat: Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan atas dasar kemanusiaan, ketidaksetaraan lantas digambarkan sebagai sesuatu yang ditetapkan atas dasar kodrat alamiah dan oleh karena itu tidak dapat diubah. Konsep tentang ras menyediakan

suatu cara bagi Barat untuk mendamaikan konflik di antara ideologi kesetaraan dan kenyataan untuk mempertahankan ketidaksetaraan (Pilkington 2015: 70).

Akhirnya segala perdebatan perihal konsep ras, justru menunjukkan ciri konstruktif dari ras itu sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Omi dan Winant (Pilkington 2015: 71): *Kategori rasial diciptakan, dihayati, diubah, dan dihancurkan oleh tindakan manusia dan oleh karena itu merupakan produk masyarakat dan bukan alam*. Sesudah kategori rasial ditinggalkan dan dihancurkan, maka konsep etnis dipakai sebagai term yang dapat diterima untuk menggambarkan keberlainan dalam masyarakat yang multi-etnik seperti Britania, Kanada, dan Australia (Spencer 2006: 48).

ETNIS SEBAGAI KONTRUKSI SOSIAL

Secara etimologis, *ethnos* (Yunani) berarti penduduk/penghuni. Istilah ini mengungkapkan rasa memiliki seseorang kepada kelompoknya. Rasa memiliki lantas menjadi keyakinan bersama yang dibagikan kepada keturunan mereka. Ikatan etnis dan bangsa biasanya ditarik berdasarkan penanda kultural, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi milik bersama.

Tidak seperti konsep ras, etnisitas diterapkan dengan menolak determinisme biologis (Pilkington 2015: 71). Ketika anggota-anggota dari suatu ras boleh jadi tidak mengidentifikasi diri mereka ikut ambil bagian dalam suatu identitas ras tertentu, anggota dari suatu kelompok etnis atau bangsa pada umumnya mengakui ambil bagian dalam suatu identitas bersama dengan anggota-anggota lain dalam kelompok mereka. Selain itu, pengikatnya bukan hanya soal garis keturunan yang sama tetapi pertama-tama karena setiap anggotanya mempercayai dan ambil bagian dalam ingatan kolektif, lalu atas dasar itu mengklaim identitas bersama. Jadi, pengidentifikasian kelompok etnis bertolak dari penetapan oleh anggota etnis itu sendiri.

Pada saat yang sama, etnisitas memiliki kesamaan dengan bangsa karena cakupannya yang lebih luas daripada kelompok kekerabatan dan tergabung dari beberapa kelompok sehingga mensyaratkan suatu imajinasi bersama. Etnis juga bisa dikatakan sebagai *imagined communities*. Dikatakan demikian, “karena anggota-anggotanya bahkan dari bangsa yang terkecil pun tidak akan pernah tahu sungguh-sungguh mengenal sesama anggota, bertemu, bahkan mendengar mereka, tetapi dalam pikiran mereka masing-masing hiduplah gambaran tentang

komunitas mereka” (Anderson 2006: 6).

Yang penting dalam pembentukan kelompok-kelompok etnis sebagai komunitas yang dibayangkan adalah sosialisasi ke dalam subkultur yang jelas, di mana anggota-anggotanya belajar untuk membedakan diri mereka dengan etnis yang lain dan mengenal bentuk-bentuk kultural yang menyimbolkan perbedaan mereka. Di sini peran kreatif dari anggota etnis menjadi titik tekannya. Namun, proses sosialisasi tidak muncul secara internal begitu saja—seperti beberapa anggota yang dominan mempengaruhi anggota lainnya, tetapi dipicu oleh kelompok etnis lainnya. Kelompok etnis selalu ada bersama dengan kelompok etnis lainnya dan karenanya, terdorong untuk mendesak pengaruh dari luar dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas dari etnis tersebut (Pilkington 2015: 71-72). Di sini peran situasi menjadi titik tekannya.

Pendekatan konstruktif Cornell dan Hatmann melihat pentingnya faktor situasi dan peran kreatif, sehingga identitas etnis dilihat sebagai produk dari suatu interaksi terus-menerus dan berkelanjutan di antara kelompok yang bertemu (termasuk konsep dan tindakan dari pihak luar) sekaligus tindakan-tindakan serta konsep dari anggota kelompok (pihak dalam) itu sendiri

(Pilkington 2015: 73). Agar ikatan etnis semakin kuat, maka dibentuklah suatu penanda etnisitas yang khas, seperti bahasa, agama, perilaku non-verbal, pandangan dunia yang khas, praktek ritual, dsb.

Penanda itu lantas diinternalisasikan secara turun-temurun melalui lembaga keluarga sehingga individu mengalaminya sebagai identitas yang primer dan fundamental. Kaum kulit hitam Amerika yang dahulunya adalah budak kaum kulit putih di Amerika adalah contohnya. Praktek diskriminatif atas mereka sampai akhir abad ke-20 mendorong mereka untuk membentuk identitas etnis tersendiri yang diikat oleh kesamaan luhur (dari Afrika) dan ingatan (sejarah penderitaan sebagai budak). Mereka lantas menciptakan produk budaya khas (seperti musik rap dan mode berpakaian) yang menjadi populer di Amerika, serta merubah konotasi negatif penampakan fisik mereka menjadi positif dengan ungkapan: *Black is beautiful* (Pilkington 2015: 72).

Kelekatan pada etnis sampai sekarang tidak menunjukkan gejala mengalami erosi. Tidak jarang setiap kelompok etnis melebihi-lebihkan batasan-batasan dan kekhasan kulturalnya satu sama lain sehingga cenderung dekat pada tendensi etnosentrisme. Seolah-olah etnis merupakan kenyataan yang

terberi secara alamiah dan bukan dikonstruksi secara sosial. Kegagalan untuk memahami etnisitas sebagai suatu konstruksi sosial yang saling terhubung dengan kelompok etnis lainnya berakibat pada hal ini: kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari norma (yang dianut kelompok mayoritas), lalu dipisahkan, disingkirkan, dan mendapat perlakuan yang diskriminatif (Pilkington 2015: 73). Kecenderungan diskriminatif tersebut menjadi tantangan besar dari negara-bangsa yang berciri multi-etnik.

BANGSA SEBAGAI KONTRUKSI SOSIAL

Miller (Pilkington 2015: 73) membedakan identitas nasional dari identitas kolektif lainnya berdasarkan kelima karakteristik berikut: (1) anggota-anggotanya merasa memiliki suatu keyakinan yang sama; (2) setiap anggotanya merasa asosiasi kebangsaan tersebut muncul dari suatu sejarah hidup bersama yang panjang dan dibayangkan akan berkelanjutan di masa depan; (3) adanya pengakuan bahwa komunitas ini aktif dan mampu mengambil keputusan-keputusan; (4) suatu pengakuan bahwa komunitasnya terkait dengan suatu teritorial tertentu; (5) adanya suatu kultur publik yang dihidupi bersama-sama dan menandai kekhasannya dari

komunitas-komunitas lainnya.

Untuk membedakannya dengan bangsa sebagai entitas politik (negara-bangsa), Pilkington (2015: 73) cenderung mengartikan identitas kebangsaan sebagai keanggotaan seseorang pada suatu komunitas yang memberikan identitas kebangsaan yang sama. Bangsa-bangsa biasanya mengakui adanya kesamaan leluhur di masa yang amat lampau. Pengakuan di atas bertolak dari fakta beberapa bangsa memuat ciri-ciri dari suatu kelompok etnis yang dominan ketika berada pada tahap pembentukan awal.

Walaupun bangsa biasanya terarah untuk membentuk suatu entitas politis, tetapi tidak dengan sendirinya identik dengan negara. Pada beberapa negara (USA misalnya) terdiri atas berbagai macam bangsa, sebaliknya bangsa tertentu (melayu misalnya) tersebar di berbagai negara. Dalam hal ini, bangsa dalam artian ketat mendahului adanya negara-bangsa. Baru pada abad ke-18 dan 19, terdapat kecenderungan bangsa-bangsa membentuk diri menjadi suatu entitas politis; negara-bangsa (Pilkington 2015: 74). Perubahan sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks pada abad itu menjadi pendorong bagi bangsa-bangsa untuk tetap bertahan melalui pembentukan komunitas politis. Miller (Pilkington 2015: 73)

mengungkapkannya demikian: *Identitas yang demikian pertama, memungkinkan kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan entitas sosial yang lebih besar, sehingga memberikan suatu kerangka bagi kita untuk memaknai kehidupan kita dan kedua, menumbuhkembangkan ikatan kepercayaan timbal balik yang memfasilitasi terbentuknya solidaritas sosial dan memungkinkan terbentuknya politik yang demokratis.*

Media cetak membantu negara-bangsa dalam menyebarkan identitas nasional dengan memberikan standar bahasa umum sehari-hari dan memungkinkan anggota yang beragam untuk memahami satu sama lain melalui suatu bahasa bersama yang tercetak. Selain itu, warganya tidak hanya diikat oleh ciri etnisitas dominan dan sejarah leluhur, tetapi bangsa sebagai entitas politik juga menuntut kesetiaan anggotanya dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan wilayah tertentu.

Bagi Woodward identitas kebangsaan adalah suatu proses representasi, yakni suatu cara anggota suatu bangsa dalam menggunakan bahasa dan sistem simbolik lainnya untuk menghasilkan makna yang memungkinkan warganya bisa menciptakan makna atas pengalaman dan identitas baik secara personal maupun kolektif (Pilkington 2015: 74).

Makna-makna itu terangkum dalam suatu narasi yang diimajinasikan dan dijadikan milik bersama. Dengan kata lain, identitas nasional direproduksi melalui narasi suatu bangsa sebagaimana dikisahkan turun-temurun melalui sejarah nasional, literatur, media dan budaya populer. Representasi melalui narasi menggambarkan kontinuitas suatu bangsa yang berakar dari kisah masa lampau sehingga identitas kebangsaan tertanam kuat dalam diri anggotanya.

Betapapun kuatnya identitas kebangsaan ditanam, dalam kenyataannya negara-bangsa pada umumnya berciri multi-etnik. Penguatan identitas kebangsaan yang berkelanjutan tetap tidak akan menghapus identitas etnis yang sebelumnya sudah ada dalam diri warganya. Negara multi-etnik biasanya selalu berada dalam usaha menjaga keutuhan di antara warga yang sama-sama ingin menunjukkan identitas etnis atau bangsanya, sebagaimana dikatakan oleh Parekh (Pilkington 2015: 75): *Dalam bangsa multi-etnik seringkali terdapat suatu tegangan di antara tuntutan akan kesatuan dan keberagaman yang keduanya saling bersaing: Di satu pihak ada kebutuhan akan kohesi dan suatu rasa memiliki bersama dan di pihak lain ada harapan dari komunitas minoritas untuk*

menjaga dan menyebarkan cara hidup mereka. Mengingat bangsa adalah komunitas yang dibayangkan, maka berbagai imajinasi lain juga dimungkinkan dan boleh dikemukakan. Negara, dengan demikian, seperti tempat kontestasi dari berbagai macam pengaruh yang melahirkan berbagai pendekatan.

TANTANGAN BAGI MULTIKULTURALISME: KONTEKS BRITANIA RAYA

Seperti halnya ras dan etnisitas, identitas kebangsaan juga merupakan konstruksi sosial dan karenanya perlu diperjuangkan, selain bersifat dinamis serta cair (Pilkington 2015: 76). Oleh karena itu tidak dapat dielakkan apabila muncul berbagai macam pendekatan yang timbul dalam negara multi-etnik. Pilkington (2015: 87) merangkumnya menjadi tiga macam pendekatan. *Pertama, eksklusif diferensial* yang memberikan hak-hak terbatas pada wilayah terbatas bagi para pendatang. Di sini bangsa dibayangkan terdiri dari mereka yang ambil bagian dalam garis nenek moyang dan etnisitas yang sama. Karena pendatang dilihat kemudian, maka mereka tidak akan diberi hak kewarganegaraan secara penuh dan bangsa tidak dapat dibentuk berdasarkan pola multi-etnik. Model ini dapat ditemukan di Jerman pada era 80-an.

Kedua, asimilasi yang memungkinkan para pendatang mendapatkan hak kewarganegaraan secara penuh tetapi mereka harus mengorbankan nilai khas etnis sekurang-kurangnya di ruang publik. Bangsa dibayangkan terdiri dari mereka yang memiliki budaya bersama sehingga tidak bisa menjadi multikultural. Model ini pernah ditemui di Prancis, misalnya pelarangan memakai atribut religius seperti hijab di ruang publik.

Ketiga, pluralisme merupakan pendekatan yang memungkinkan pendatang bisa mendapatkan hak kewarganegaraan penuh tanpa harus mengorbankan kekhasan budayanya. Suatu proses penyesuaian timbal balik dimungkinkan karena bangsa dibayangkan terdiri dari mereka yang tinggal di tanah air yang sama. Di sini multikulturalisme bisa diupayakan. Model ini diupayakan sejak awal oleh Britania Raya yang *de facto* terdiri atas berbagai macam penduduk berkulit putih (orang Inggris, Skotlandia, Irlandia dan Wales), para pendatang dari Afrika, Asia dan etnis campuran.

Bukan berarti multikulturalisme di Britania Raya tanpa ancaman. Seperempat abad belakangan muncul desakan dari Skotlandia dan Wales untuk melepaskan diri. Selain itu identitas etnis menguat bersamaan dengan praktek diskriminasi rasial

dan agama (Islam khususnya) di beberapa tempat (Pilkington (2015: 871-87). Alih-alih memerintahkan berfokus pada menguatnya etnosentrisme, sasaran pemerintah justru berpusat pada bahaya terorisme, meningkatnya jumlah migran, dan multikulturalisme. Beberapa pernyataan Perdana Menteri David Cameron tampak menuding multikulturalisme sebagai biang keladi dari merosotnya nasionalisme dan biasa bermain di wilayah oposisi biner: kita (Inggris) dan mereka (imigran), Britania lawan Muslim, atau muslim moderat lawan ekstrimis (Pilkington 2015: 89-91).

Sesudah Britania Raya keluar dari Uni Eropa—berdasarkan jajak pendapat Inggris dan Wales memilih keluar sedangkan Skotlandia dan Irlandia Utara memilih bertahan—mengesankan kesatuan mulai digoncang. Narasi tentang Britania Raya yang merujuk pada kejayaan di abad 19 mulai dianggap usang. Bertolak dari contoh Britania Raya, kesatuan negara-bangsa tidak memadai jika hanya bertolak dari romatisisme masa lampau dan mengacuhkan negara-bangsa sebagai “proyek bersama” yang dikonstruksi secara sosial dalam proses yang tidak kunjung henti, sebagaimana dikatakan oleh Benedict Anderson (1999:2): *Jika kita mempelajari tentang sejarah*

dunia, maka dapat dikatakan bahwa nasionalisme bukanlah sesuatu yang diwariskan dari masa lampau, namun lebih kepada sebuah “proyek bersama” (common project) untuk kini dan di masa depan. Dan proyek ini lebih membutuhkan pengorbanan pribadi, bukannya malah mengorbankan orang lain.

PENUTUP: MELIHAT NKRI SEBAGAI KONTRUKSI SOSIAL

Melihat negara-bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan dan dikonstruksi secara sosial jelas bukan tanpa resiko. Ikatan-ikatan yang selama ini dianggap mapan dan “harga mati” bisa jadi perlu ditinjau ulang. Apa yang terjadi di Britania Raya *mutatis mutandis* juga terjadi dalam gagasan besar NKRI. Negara kesatuan tidak cukup hanya diikat oleh kisah-kisah kejayaan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya di masa lampau, sembari harus diakui proyek bersama tidak selalu menjadi kesadaran semua warga di dalam negara kesatuan itu.

Identitas bukan sekedar warisan masa lampau, tetapi buah dari proses deliberatif antar definisi yang diajukan berbagai macam entitas yang berbeda-beda. Kontestasi kelompok etnis dan agama biasanya mengemuka jelas ketika ada perubahan sosio-politis yang cukup signifikan. Upaya kelompok tertentu untuk mendominasi ruang publik

biasanya terjadi dengan memainkan logika oposisi biner. Misalnya dalam kerusuhan Mei atau menjelang pemilu/pilkada, akan tampak oposisi tersebut: cina dan pribumi; minoritas dan mayoritas; Islam dan Barat; haram dan halal, dsb. Dalam kondisi yang demikian, menunjukkan inkonsistensi dari oposisi tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk membendung satu kelompok mendominasi dan merendahkan kelompok lainnya.

Contoh lainnya: Menyematkan gerakan kemerdekaan di Papua dengan gerakan separatisme juga perlu ditinjau ulang. Apabila, rakyat Papua tidak merasa dirinya sebagai bagian dari NKRI bisa jadi karena mereka tidak merasa mewarisi narasi besar kisah masa lampau. ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*) mengklaim sebagian besar rakyat Papua tidak memasukkan dirinya ke dalam Indonesia karena mereka termasuk ke dalam bangsa Melanesia yang berbeda dari rumpun bangsa Melayu (ULMWP 2015: 1,10). Kategori rasial “Melanesia” mereka pahami secara baru—bukan seperti pandangan para antropolog abad 19—sebagai identitas bangsa yang merdeka, khas, dan memiliki wilayah serta sejarahnya sendiri.

Apabila pada masa Hindia Belanda, bangsa Melayu

dianggap sebagai ras inferior dan dijadikan pembenaran bagi kolonialisme Barat, maka oposisi biner Barat (penjajah) dan Timur (terjajah) perlu ditilik secara cermat dalam konteks Indonesia sekarang. Bukankah represi militer di Papua Barat sejak aksi Trikora 1961 dan Pepera 1969, hegemoni kultur etnis dominan Jawa dan pengerukan sumber daya alam sejak orde baru terhadap Papua, justru membalikkan bangsa bekas jajahan (Indonesia) menjadi kolonialis baru? Pakaian Koteka, rumah Honai, pola berpikir Papua dinilai sebagai primitif dan karenanya perlu diubah dan “diberadabkan”. Bukankah ini mirip dengan “emansipasi setengah hati” dari humanisme Barat?

Sejauh NKRI dilihat sebagai kontruksi sosial atau suatu komunitas yang dibayangkan maka definisi tersebut bukanlah harga mati. Mengupayakan multikulturalisme bukan hanya menjaga keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman, tetapi juga bersiap kehilangan keyakinan lama (Indonesia dari Sabang sampai Merauke) yang jauh dari kenyataan. Proyek

bersama tidak bisa dipaksakan oleh represi militer atau reproduksi kekuasaan—dalam bentuk yang paling halus sekalipun (pembangunan infrastruktur dan pendidikan)—selama suatu bangsa *de facto* tidak merasa menjadi bagian dari proyek itu.

Dalam kaitannya dengan Papua, pudarnya komitmen terhadap multikulturalisme di Indonesia bisa jadi justru bersumber dari dalam, ketika pemerintah melupakan hakikat negara sebagai kontestasi berbagai macam pendekatan, dengan konsekuensinya definisi NKRI bisa berubah. Bisa jadi suatu waktu pola negara kesatuan bisa dianggap usang dan diganti dengan pola federasi. Menolak ciri dinamis dan cair dari negara-bangsa, berarti membuka ruang bagi adanya represi dan NKRI justru tampak sebagai dongeng belaka, sebagaimana diingatkan oleh Benedict Anderson di penghujung abad lalu: *Waspadalah kepada siapapun yang membuat negara menjadi sesuatu yang sakral dan senantiasa dipuja, dan waspadalah kepada siapa saja yang selalu membanggakan “kejayaan nenek moyang*

yang begitu agung”. Milikmu akan segera dicurinya (Anderson 1999: 2).

SUMBER BACAAN:

ANDERSON, BENEDICT. 2006. *Imagined Communities* (first published 1983). New York: Verso.

ANDERSON, BENEDICT. 1999. *Indonesian Nationalism Today and In The Future* (teks presentasi Anderson pada peringatan 28 tahun TEMPO di Hotel Borobudur, Jakarta.

HARDIMAN, F. BUDI. 2012. *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia*. Jakarta: KPG Gramedia.

PILKINGTON, ANDREW. “Race, Ethnicity and Nationality: the Future of Multiculturalism in a Global Age” in Martin Holborn (editor). 2015. *Contemporary Sociology*. Malden: Polity Press.

SPENCER, STEPHEN. 2006. *Race and Ethnicity: Culture, Identity, and Representation*. New York: Rotledge.

ULMWP. 2015. *Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa Melanesia di Papua Barat*.



SUMBER GAMBAR:

<https://www.merdeka.com/ireporters/peristiwa/seberapa-besar-cinta-kita-terhadap-nkri-.html>